



**INSTRUMEN ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA  
KEPAILITAN  
(STUDI: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG  
MASUK BOEDEL PAILIT)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**RIZKY DWI TANTRI PUTRA, S.H.  
2110622034**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2023**



**INSTRUMEN ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA  
KEPAILITAN  
(STUDI: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG  
MASUK BOEDEL PAILIT)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

**RIZKY DWI TANTRI PUTRA, S.H.  
2110622034**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Nama : Rizky Dwi Tantri Putra  
NRP : 2110622034  
Tanggal : 12 Juni 2023

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juni 2023  
Yang Menyatakan,



(Rizky Dwi Tantri Putra, S.H.)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Dwi Tantri Putra, S.H.  
NRP : 2110622034  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

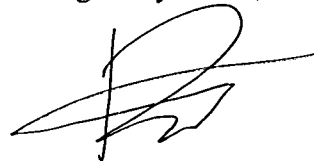
**Instrumen Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan  
(Studi: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak  
Tanggung Atas Tanah Yang Masuk Boedel Pailit)**

Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juni 2023

Yang menyatakan,



(Rizky Dwi Tantri Putra, S.H.)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati , Pondok Labu , Jakarta Selatan 12450  
Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904  
Laman : fh.upnvj.ac.id, Email: fh@upnvj.ac.id

---

**TESIS**

**INSTRUMEN ACTIO PAULINA DALAM PERKARA  
KEPAILITAN (STUDI: PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN  
ATAS TANAH YANG MASUK BOEDEL PAILIT)**

**RIZKY DWI TANTRI PUTRA, S.H.  
2110622034**

Telah disetujui untuk Ujian Tesis

**Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.**  
**NIK. 217121294**

Jakarta, 3 Juli 2023  
Mengesahkan,

**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.**  
**NIP 199304282022031009**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati , Pondok Labu , Jakarta Selatan 12450  
Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904  
Laman : fh.upnvj.ac.id, Email: fh@upnvj.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis diajukan oleh :

Nama : Rizky Dwi Tantri Putra, S.H.

NRP : 2110622034

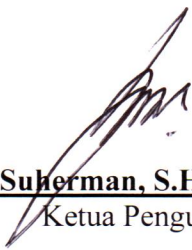
Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Instrumen Actio Paulina Dalam Perkara Kepailitan

(Studi: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang

Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Masuk Boedel Pailit)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

  
**Dr. Suherman, S.H., LL.M.**

Ketua Penguji

  
**Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.**

Penguji I

  
**Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.**

Penguji II (Pembimbing)

  
**Dr. Suherman, S.H., LL.M.**

Dekan  


  
**Dr. Handar S. B., S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes**

Kepala Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 14 Juli 2023

## **ABSTRACT**

*Actio pauliana as an instrument provided for by Law Number 37 of 2004 functions to protect bankruptcy creditors, but actio pauliana as a legal instrument still encounters several problems including those relating to legal protection for mortgage holders and the imposition of sanctions for debtors who do not carry out the results of the bankruptcy decision and actio pauliana. This study aims to analyze the actio pauliana instrument in providing legal protection for mortgage holders and the imposition of sanctions on debtors who do not hand over bankrupt assets to the curator for the granting of actio pauliana's lawsuit. This research uses normative juridical legal research methods. The results showed that creditors holding mortgage rights (separatists) were given the authority to carry out self-execution of collateral after passing a suspension period of no longer than 90 days from the date the bankruptcy declaration decision was pronounced and the execution was carried out no later than 2 months after the start of the state of insolvency. The imposition of sanctions on debtors who do not hand over bankruptcy assets to the curator for the granting of an actio pauliana lawsuit can be in the form of civil or criminal sanctions, by adjusting to the form of mistakes and unlawful acts committed by creditors and also depending on the choice of law for creditors. The suggestion of this research is that the Government needs to carry out legal socialization regarding the assets of bankrupt debtors included in the bankrupt debtor, especially bankrupt assets burdened with mortgage rights, so that the parties involved in the bankruptcy process can understand the existing legal rules and the Government needs to revise Law No. 37 of 2004 specifically related to the addition of articles that regulate sanctions both criminal sanctions and civil sanctions that will be imposed on debtors who do not carry out their obligations in accordance with Law no. 37 of 2004.*

*Keywords: Bankruptcy, Actio Pauliana, Mortgage.*

## ABSTRAK

*Actio pauliana* sebagai instrumen yang disediakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berfungsi untuk melindungi kreditor kepailitan, namun *actio pauliana* sebagai instrumen hukum masih menemui beberapa permasalahan diantaranya adalah berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang hak tanggungan dan pengenaan sanksi bagi debitur yang tidak menjalankan hasil putusan kepailitan dan *actio pauliana*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen *actio pauliana* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan dan pengenaan sanksi terhadap debitur yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan kreditor pemegang hak tanggungan (separatis) diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan setelah melewati masa penangguhan paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan eksekusinya dilakukan paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Pengenaan sanksi terhadap debitur yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana* bisa berupa sanksi secara perdata maupun pidana, dengan menyesuaikan pada bentuk kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditor dan tergantung juga pada pilihan hukum bagi kreditor. Saran penelitian ini adalah Pemerintah perlu melakukan sosialisasi hukum mengenai harta debitur pailit yang masuk dalam *boedel* pailit khususnya harta pailit yang dibebani hak tanggungan, sehingga para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dapat memahami aturan hukum yang ada dan Pemerintah perlu merevisi UU No. 37 Tahun 2004 khususnya berkaitan dengan penambahan pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata yang akan dikenakan kepada debitur yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004.

Kata Kunci : Kepailitan, *Actio Pauliana*, Hak Tanggungan.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulisan tesis berjudul **“Instrumen Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan (Studi: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Masuk Boedel Pailit)”** dapat diselesaikan sebagai prasyarat tugas akhir pendidikan Magister Hukum.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dorongan dan bantuan banyak pihak, oleh karenanya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Bapak Dr. Anter Venus, MA.Comm.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M.
3. Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.
4. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. selaku pembimbing tesis.
5. Orang tua, istri, anak-anak, keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua

Jakarta, 12 Juni Tahun 2023

Rizky Dwi Tantri Putra, S.H.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul .....	i
Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis.....	iii
Halaman Persetujuan Ujian Tesis.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Abstract.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penelitian.....	8
I.4 Manfaat Penelitian.....	8
I.5 Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	9
A. Kerangka Teori.....	9
B. Kerangka Konseptual.....	11
I.6 Sistematika Penulisan .....	13
I.7 Literatur Review .....	14
Bab II Tinjauan Pustaka.....	17
II.1 Tinjauan Umum Hukum Kepailitan.....	17
II.2 Tinjauan Umum <i>Actio Pauliana</i> .....	37
Bab III Metode Penelitian.....	40
III.1 Jenis Penelitian.....	40
III.2 Pendekatan Penelitian .....	40
III.3 Sifat Penelitian.....	41
III.4 Analisis Penelitian.....	41

III.5 Analisis Bahan Hukum.....	41
Bab IV: Analisis Instrumen <i>Actio Pauliana</i> Dalam Perkara Kepailitan (Studi : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Masuk Boedel Pailit).....	43
IV.1 Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Masuk <i>Boedel</i> Pailit .....	43
IV.2 Pengenaan Sanksi Terhadap Debitor Yang Tidak Menyerahkan Harta Pailit Kepada Kurator Atas Dikabulkannya Gugatan <i>Actio</i> <i>Pauliana</i> .....	56
Bab V: Penutup.....	68
V.1 Kesimpulan.....	68
V.2 Saran.....	68
Daftar Pustaka	